

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kota Malang merupakan kota terbesar nomor 2 di Jawa Timur hal ini disebabkan oleh tersedianya macam-macam perguruan tinggi dan daya tarik wisata, sehingga banyak penduduk baru yang ber-urbanisasi dari daerahnya masing-masing menuju ke Kota Malang. Banyak tujuan tempat wisata baik untuk keluarga maupun untuk perorangan ditambah fasilitas tempat wisata yang sangat memadai menjadikan daya tarik turis domestik maupun mancanegara.

Untuk pemberian rasa nyaman terhadap masyarakat banyak yang berkunjung ke Kota Malang, pemerintah Kota Malang telah banyak membangun trotoar jalan sebagai sarana umum yang dapat diperuntukkan kepada pejalan kaki.

Trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan di antara fasilitas-fasilitas lainnya seperti: lajur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan atau fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut.¹

Penting diketahui, ketersediaan fasilitas trotoar merupakan hak pejalan kaki.² Ini artinya, trotoar diperuntukkan untuk pejalan kaki dan bukan untuk orang pribadi, hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2

¹ Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

² Pasal 131 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Tahun 2012 Tentang Ketertiban Umum Dan Lingkungan, bahwasannya Pasal 4

Huruf G berbunyi:

“Tanpa izin pejabat yang berwenang, setiap orang atau badan dilarang menggunakan bahu jalan atau trotoar tidak sesuai dengan fungsinya.”

Diatur bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi fasilitas pejalan kaki dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00.³ Lalu dijelaskan bahwa setiap orang yang merusak Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, fasilitas Pejalan Kaki, dan alat pengaman Pengguna Jalan sehingga tidak berfungsi dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).⁴

Setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan, salah satunya adalah fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang cacat.⁵ Dalam peraturan tersebut juga diatur bahwa pejalan kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung berupa trotoar, tempat penyeberangan, dan fasilitas lain.⁶ Pejalan kaki juga berhak mendapatkan prioritas pada saat menyeberang jalan di tempat penyeberangan sehingga pejalan

³ Pasal 275 ayat 1 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

⁴ Ibid.

⁵ Pasal 25 ayat 1 Huruf G Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

⁶ Pasal 131 ayat 1 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

kaki wajib menggunakan bagian jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki atau jalan yang paling tepi, atau menyeberang di tempat yang telah ditentukan.⁷

Hak pejalan kaki dibagi menjadi tiga, yaitu:⁸

- 1) *Pejalan kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung berupa trotoar, tempat penyeberangan dan fasilitas lain.*
- 2) *Pejalan kaki berhak mendapatkan prioritas pada saat menyeberang jalan di tempat penyeberangan.*
- 3) *Dalam hal belum tersedia fasilitas sebagaimana dimaksud diatas pejalan kaki berhak menyeberang di tempat yang dipilih dengan memperhatikan dirinya.*

Maksudnya ialah pejalan kaki memiliki hak untuk mendapatkan fasilitas pendukung untuk berjalan kaki, fasilitas tersebut berupa trotoar maupun tempat penyeberangan jalan, fasilitas tersebut berguna supaya pejalan kaki merasa aman ketika berjalan di samping jalan raya sehingga dapat meminimalisir kecelakaan.

Kewajiban pejalan kaki, di antaranya:⁹

- 1) *Pejalan Kaki wajib:*
 - a. *menggunakan bagian Jalan yang diperuntukkan bagi Pejalan Kaki atau Jalan yang paling tepi;*
 - b. *menyeberang di tempat yang telah ditentukan.*
- 2) *Dalam hal tidak terdapat tempat penyeberangan yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pejalan Kaki wajib memperhatikan Keselamatan dan Kelancaran Lalu Lintas.*
- 3) *Pejalan Kaki penyandang cacat harus mengenakan tanda khusus yang jelas dan mudah dikenali Pengguna Jalan lain.*

Maksudnya ialah pejalan Kaki memiliki hak untuk menyeberang di tempat yang dipilih dengan memperhatikan keselamatan dirinya dan pejalan kaki wajib

⁷ Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

⁸ Pasal 131 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

⁹ Pasal 132 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

untuk menggunakan bagian Jalan yang diperuntukkan bagi Pejalan Kaki atau Jalan yang paling tepi, atau menyeberang di tempat yang telah ditentukan.

Fasilitas pejalan kaki sendiri berupa trotoar terdapat pengaturannya dalam pasal 1 Nomor 11 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Ketertiban Umum Dan Lingkungan, berbunyi:

“Trotoar adalah lahan, bangunan dan peralatan atau perlengkapan yang disediakan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan atau pihak lain yang diperuntukkan bagi pejalan kaki.”

Perlindungan hukum bagi hak-hak pejalan kaki yang sifatnya preventif seperti pengaturan yang ada akibat hukum berupa sanksi pidana, apabila ada peristiwa yang mengganggu hak pejalan kaki, diatur juga dalam undang-undang tersebut.

Apabila sudah diatur sebagai peristiwa tindak pidana dalam sebuah peraturan-perundang-undangan, maka untuk berjalanya sebuah aturan hukum tersebut agar dapat ditegakan, maka tentunya dibutuhkan aparat penegak hukum yang memiliki peran penyidikan dan juga penindakan apabila terjadi pelanggaran ketentuan pidana tersebut.

Pemerintah Daerah Kota Malang sudah memberikan rambu-rambu hukum dalam penyelenggaraan trotoar yang sesuai, tertera di dalam Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Ketertiban Umum Dan Lingkungan yang berbunyi bahwa:

Tanpa Izin Pejabat yang berwenang, setiap orang atau badan dilarang untuk:

- a. menutup jalan,*
- b. menutup saluran drainase,*
- c. membuat atau memasang portal,*
- d. membuat atau memasang tanggul jalan,*

- e. membuat atau memasang pintu penutup jalan,*
- f. membongkar jalan, trotoar dan memasang jalur pemisah, rambu-rambu lalu lintas, pulau-pulau jalan dan sejenisnya,*
- g. menggunakan bahu jalan (trotoar) tidak sesuai dengan fungsinya,*
- h. melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat berakibat merusak sebagian atau seluruh badan jalan dan membahayakan lalu lintas,*
- i. menggunakan halte yang tidak sesuai fungsinya,*
- j. berjualan di tempat yang tidak diperbolehkan,*
- k. mencoret, menempel di tembok, tiang listrik, tiang telepon dan tempat-tempat fasilitas umum lainnya dan*
- l. menempatkan benda-benda dan atau barang bekas pada tepi-tepi jalan raya dan jalan-jalan lingkungan permukiman.*

Kenyataannya masih banyak pelanggaran yang terjadi di dalam area trotoar seperti digunakan untuk tempat jual beli atau pribadi dan banyaknya kendaraan yang melintasi trotoar karena macet yang kesemuanya mengerucut kepada tindakan pidana ringan karena menggunakan fasilitas trotoar dengan tidak sebagaimana fungsinya.¹⁰

Pelanggaran yang penggunaan fasilitas trotoar yang tidak digunakan sebagaimana fungsinya tersebut berdampak buruk bagi pejalan kaki, pejalan kaki disulitkan memperoleh haknya menggunakan fasilitas yang telah disediakan oleh pemerintah yaitu trotoar, pelanggaran tersebut diantaranya digunakan masyarakat untuk mencari nafkah dengan dijadikan sarana untuk penyedia jasa parkir, selanjutnya trotoar juga digunakan sebagai tempat berdagang yang sebenarnya ini sangatlah berbahaya dan hal tersebut sangat mengganggu pejalan kaki dalam mendapatkan hak-nya untuk menggunakan trotoar sebagai fasilitas umum yang disediakan oleh pemerintah.¹¹

¹⁰ Ahmad Nur Hidayat, *Alih Fungsi Trotoar Di Kota Malang*, radarmalang.id, diakses pada 18 Oktober 2018

¹¹ Ibid.

Di Malang masih banyak terjadi penyalahgunaan trotoar yang mengakibatkan keterbatasan ruang bagi pejalan kaki, diantaranya yaitu pedagang kaki lima yang berdagang di atas trotoar, pemilik toko yang meletakkan barang dagangannya di atas trotoar dan parkir sepeda motor di atas trotoar.¹² (lihat gambar 1 dan 2)

Sanksi pidana sudah diatur dalam Pasal 33 angka 1 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Ketertiban Umum dan Lingkungan, berbunyi:

“Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan pasal 4, pasal 5, pasal 21 dan pasal 22 dia diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan dan atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).”

Sanksi pidana sudah dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Ketertiban Umum Dan Lingkungan namun masih banyak juga pelanggaran, dikutip dari *korannemo.com* tanggal 1 Februari 2018, Seperti trotoar di Jalan Mertojoyo dan Jalan Sigura-gura yang mana pada kedua jalan tersebut terdapat trotoar yang digunakan sebagai lahan parkir, lahan parkir tersebut sengaja dibuat oleh juru parkir karena banyak orang yang keluar-masuk ATM di jalan tersebut, berbeda dengan trotoar yang berada di Jalan Sulawesi dan Jalan Tenes, di sana trotoar yang seharusnya menjadi hak pejalan kaki telah beralih fungsi menjadi tempat pedagang yang mana, hal inilah yang menyebabkan penyalahgunaan fasilitas trotoar yang seharusnya menjadi hak bagi pejalan kaki di Kota Malang.¹³

¹² Ibid.

¹³ Yudha Kriswanto, *Trotoar Alih Fungsi*, Warga Jadi Geram, <http://koranmemo.com> diakses pada 4 Desember 2018

Apabila sudah diatur sebagai peristiwa tindak pidana dalam sebuah peraturan-perundang-undangan, maka untuk berjalanya sebuah aturan hukum tersebut agar dapat ditegakan, maka tentunya dibutuhkan aparat penegak hukum yang memiliki peran penyidikan dan juga penindakan apabila terjadi pelanggaran ketentuan pidana tersebut.

Berdasarkan hasil berita dari *surayamalang.tribunnews.com*, pada 30 November 2017, Sejumlah petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Malang menyusuri beberapa ruas trotoar di Kota Malang, aksi yang dilakukan Satpol PP ini bukanlah razia, tetapi bentuk persuasif kepada masyarakat, sosialisasi yang dilakukan tentang fungsi trotoar. Trotoar yang disusuri mulai dari Alun-Alun Kota Malang, kawasan Pecinan hingga Klenteng.

Menurut Priyadi selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang:¹⁴

“Jarak yang ditempuh sekitar 2 KM panjang trotoar, mulai dari Alun-Alun sampai dengan Klenteng. Kami melakukan sosialisasi sebagai bentuk persuasif kepada masyarakat, bagaimana memfungsikan trotoar secara benar, ini bentuk imbauan kami supaya trotoar tidak dipakai untuk berjualan “.

Trotoar merupakan jalan yang diperuntukkan untuk pejalan kaki, oleh karena itu trotoar merupakan hak bagi pejalan kaki. Berkenaan dengan hal tersebut, kata Priyadi, trotoar tidak boleh dipakai untuk berjualan karena merampas hak pejalan kaki.

Aksi Satuan Polisi Pamong Praja ini menarik warga karena diikuti oleh sejumlah Satuan Polisi Pamong Praja perempuan. Petugas perempuan itu

¹⁴Sri Wahyunik, *Satpol PP Kota Malang Imbau Warga Agar Jangan Jadikan Trotoar untuk Berjualan*, suryamalang.tribunnews.com di akses pada 4 Desember 2018

berjalan sambil beberapa poster antara lain bertuliskan *‘trotoar untuk berjalan, bukan untuk berjualan’*, juga *‘salah kaprah kalau beli di zona larangan berjualan’*.

Terkait dengan aparat yang memiliki kewenangan melakukan penyidikan dan penindakan terhadap berbagai bentuk pelanggaran pidana, undang-undang menyebutkan 2 aparat yang memiliki kewenangan yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia dan juga Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).¹⁵

Pasal 32 ayat 1 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Ketertiban Umum Dan Lingkungan, berbunyi:

“Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini.”

Selanjutnya perihal penyidik diatur dalam Pasal 1 angka 21 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Ketertiban Umum Dan Lingkungan, berbunyi:

“Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang- Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang ketertiban umum , kebersihan dan penataan Pedagang Kaki Lima.”

Berdasarkan hal yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk mempelajari, memahami, dan meneliti secara lebih mendalam mengenai bentuk penegakan hukum pidana atas pelanggaran penggunaan trotoar yang tidak sesuai dengan fungsinya ditinjau dari Pasal 4 Huruf G Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Ketertiban Umum Dan Lingkungan di Malang

¹⁵ Pasal 259 ayat 1 Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pada ketentuan

yang tanggung jawabnya masih lemah dikarenakan juga masyarakat pejalan kaki kurang menyadari pentingnya fasilitas umum yaitu trotoar yang menjadi haknya, sehingga masyarakat tidak semena-mena dalam menggunakan trotoar yang tidak semestinya.

Selanjutnya berdasarkan uraian yang melatarbelakangi masalah tersebut penulis menyusunnya dalam suatu penulisan hukum yang berjudul: **“PENEGAKAN HUKUM ATAS PELANGGARAN PENGGUNAAN TROTOAR YANG TIDAK SESUAI DENGAN FUNGSINYA DITINJAU DARI PASAL 4 HURUF G PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN LINGKUNGAN.”**

B. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan dari permasalahan-permasalahan di atas, penulis merumuskan beberapa permasalahan penelitian yang diangkat, diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum atas pelanggaran penggunaan trotoar yang tidak sesuai dengan fungsinya ditinjau dari Pasal 4 Huruf G Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Ketertiban Umum Dan Lingkungan?
2. Apa kendala-kendala dalam penegakan hukum atas pelanggaran penggunaan trotoar yang tidak sesuai dengan fungsinya ditinjau dari Pasal 4 Huruf G Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Ketertiban Umum Dan Lingkungan?

C. Tujuan Penelitian

Selaras dengan rumusan masalah diatas, penulis mempunyai tujuan yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum atas pelanggaran penggunaan trotoar yang tidak sesuai dengan fungsinya ditinjau dari Pasal 4 Huruf G Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Ketertiban Umum Dan Lingkungan yang dilakukan Di Kota Malang sudah tepat.
2. Untuk mengetahui kendala dalam penegakan hukum atas pelanggaran penggunaan trotoar yang tidak sesuai dengan fungsinya ditinjau dari Pasal 4 Huruf G Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Ketertiban Umum Dan Lingkungan yang dilakukan Di Kota Malang.

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini, diantaranya :

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa pemahaman mengenai alasan-alasan teoritis bagi penegak hukum dalam menyidik perkara tindak pidana ringan terhadap pelanggaran yang terjadi di trotoar.
- b. Penelitian ini juga diharapkan sebagai bahan studi bagi akademisi dalam memahami bentuk tindak pidana ringan dalam penegakan hukum pidana atas pelanggaran penggunaan trotoar yang tidak sesuai dengan fungsinya yang ada di Indonesia khususnya di Kota Malang.

E. Manfaat Penelitian

a. Bagi Penulis

Penelitian ini berguna untuk menambah ilmu pengetahuan, wawasan dan pengalaman bagi penulis dalam mengembangkan teori-teori hukum didalam kehidupan masyarakat, sekaligus sebagai syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan S1 di bidang ilmu hukum.

b. Bagi Penegak Hukum

Penelitian ini dapat dijadikan pengetahuan dan referensi baru bagi penegak hukum khususnya yang menangani dalam tindak pidana ringan agar dapat menjerat segala pihak yang telah melanggar hukum dalam penelitian ini.

c. Bagi Pemerintah Daerah Kota Malang

Memberikan wawasan baru terkait Pelanggaran Pasal 4 huruf G Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum dan Lingkungan yang dilakukan di Kota Malang dan bagi Pemerintah Kota Malang untuk mengetahui bentuk tanggung jawab terhadap Implementasi trotoar yang sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Ketertiban Umum Dan Lingkungan.

d. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bagian dari pertimbangan penegakkan hukum bagi penegak hukum agar hak-hak individu masyarakat utamanya dapat dilindungi dan berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat dan Sebagai pengetahuan bagi masyarakat agar

tidak melanggar suatu peraturan agar tidak terjadi ketidakpatuhan yang akan merugikan bagi orang lain maupun dirinya sendiri.

F. Metode Penelitian

Metode adalah suatu sarana pokok pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh karena suatu penelitian bertujuan untuk mengungkap kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten dengan mengadakan analisis.¹⁶ Sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis suatu hal sampai menyusun laporannya.¹⁷

Penjelasan mengenai definisi metode penelitian diatas memberikan gambaran kepada penulis bahwa metode penelitian merupakan cara untuk melakukan kegiatan penelitian ilmiah secara sistematis, teratur, dan mendalam sehingga dapat memperoleh sebuah kebenaran dari fenomena yang diteliti, untuk itu diperlukan sebuah pendekatan penelitian supaya menjadi jelas apakah yang akan diteliti, dan harus bagaimana proses dalam penelitian tersebut.

1. Metode Pendekatan

Didalam penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu lebih menitik beratkan kepada studi terhadap fenomena hukum yang telah terjadi di masyarakat. Uraian serta masalah akan ditelusuri dengan menggunakan pendekatan Yuridis Sosiologis. Yuridis yaitu pendekatan dari aspek hukum positif yaitu Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Ketertiban Umum Dan Lingkungan.

¹⁶ Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. 1985. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. CV Rajawali. Jakarta. hlm : 1

¹⁷ Soekanto, Sardjono. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet III. UI Press. Jakarta. hal: 3.

Sedangkan sosiologis merupakan pendekatan dengan melihat kejadian atau kenyataan pada masyarakat.¹⁸ Kejadian atau kenyataan pada masyarakat dalam penelitian ini yaitu mengenai pelanggaran penggunaan trotoar yang tidak sesuai dengan fungsinya ditinjau dari Pasal 4 Huruf G Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Ketertiban Umum Dan Lingkungan.

Maka pendekatan yuridis sosiologis yaitu pendekatan yang menitik beratkan pada aturan hukum (*Das Sollen*) dan dipadukan dengan menelaah fakta-fakta sosial (*Das Sein*) yang terkait dalam penelitian.¹⁹

2. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis memilih Kantor Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang. Alasan penulis memilih instansi tersebut adalah karena satuan polisi pamong praja memiliki kewenangan untuk menertibkan kawasan trotoar, terbukti pada Januari 2018 satuan polisi pamong praja mendapatkan kurang lebih 29 perkara pelanggaran terkait dengan peraturan daerah nomor 2 tahun 2012 Kota Malang tentang ketertiban umum dan lingkungan.²⁰

¹⁸ Abdurrahman, Muslan, 2009, *Sosiologi Dan Metode Penelitian Hukum*. Malang. UMM Press, Hal:103

¹⁹ Waluyo, Bambang, 1991, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika. Hal: 17.

²⁰ Iwan Irawan, Selama Januari, *Satpol PP Kota Malang Ungkap 40 Perkara Tipiring*, www.bangsaonline.com diakses pada 4 Desember 2018

3. Jenis Data

Dalam sebuah penelitian dan merupakan hal penting yang diperuntukkan sebagai bahan kajian khususnya dalam kajian hukum, data atau sumber hukum primer dan sekunder yang digunakan dalam proses analisis secara yuridis sosiologis.

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder.²¹

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang akan diperoleh secara langsung dari pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang yang berhubungan dengan permasalahan pelanggaran penggunaan trotoar yang tidak sesuai dengan fungsinya mengenai masalah-masalah yang menjadi pokok bahasan, melalui wawancara dengan narasumber, yang dianggap memiliki keterkaitan dan kompetensi dengan permasalahan yang ada. Data dalam penelitian ini yaitu data yang berkaitan dengan tentang penyidikan dalam mengungkap suatu tindak pidana ringan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pendukung dari data primer. Data sekunder diperoleh dari kajian kepustakaan dan undang-undangan,

²¹ Soekanto, Sardjono & Mamudji, Sri. 2001. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu tinjauan singkat*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. hlm. 14.

buku-buku literatur maupun hasil penelitian terdahulu sebagai acuan tambahan bagi penulis. Sumber data yang terkait antara lain:

- 1) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012
Tentang Ketertiban Umum Dan Lingkungan
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

c. Data Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang diperoleh dari ensiklopedia, jurnal hukum, kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia. Penulis menggunakan bahan hukum tersier sebagai bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

H. Teknik Pengumpulan Data Penelitian

Teknik pengumpulan data dilakukan penulis melalui :

1) Wawancara

Penulis menggunakan wawancara sebagai metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab yang dilakukan secara sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian. Tanya jawab yang berarti bahwa pengumpul data yang aktif bertanya, sementara pihak yang ditanya aktif memberikan jawaban atau tanggapan yang dilakukan secara sistematis, telah terencana, dan mengacu pada tujuan penelitian yang dilakukan.

Wawancara dilakukan dengan responden untuk menanyakan fakta-fakta yang ada, pendapat maupun persepsi dari responden pelaku, diantaranya adalah:

- a) Syska Kristina Damayanti selaku Kepala Bidang Pengelola Data Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang
- b) Heri Mulyono selaku Kepala Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang.

2) Studi Kepustakaan

Penulis melakukan penelusuran bahan-bahan kepustakaan seperti berbagai literatur atau buku-buku atau jurnal.

3) Studi *Website* atau penelusuran *Internet*

Penelusuran penulis dengan menggunakan jaringan internet untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan penelitian.

I. Teknik Analisa Data

Setelah melakukan teknik pengumpulan data penelitian baik wawancara, studi kepustakaan, maupun penelusuran internet telah dirasa cukup, maka penulis menggunakan metode Deskriptif Kualitatif yaitu mendeskripsikan dengan cara menggambarkan kejadian kemudian dianalisa menggunakan Deskriptif Kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode untuk menyelidiki obyek yang tidak dapat diukur dengan angka-angka ataupun ukuran lain yang bersifat eksak.

J. Rencana Sistematika Penulisan

Agar mudah dalam penyusunan karya tulis ini, penulis membagi menjadi 4 (empat) bagian, supaya sistematika penelitian hukum menjadi lebih mudah untuk dipahami secara teratur seperti, urutan berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan tentang latar belakang kajian hukum yang akan diteliti bagaimana adanya kesenjangan antara praktik dengan teorinya, selain itu juga akan dipaparkan rumusan masalah yang akan diteliti, tujuan penelitian, selain itu penulis juga akan menguraikan metode penelitian yang digunakan untuk membahas hasil kajian yang akan diteliti.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai kajian pustaka yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat, antara lain: kajian teori tentang Penegakan Hukum, Pelanggaran, Sanksi dan Ketertiban Umum.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis akan memaparkan, menguraikan serta menganalisa secara rinci dan jelas rumusan masalah yang berhubungan dengan obyek yang akan diteliti terkait dengan penegakan hukum atas pelanggaran penggunaan trotoar yang tidak sesuai dengan fungsinya ditinjau dari Pasal 4 Huruf G Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Ketertiban Umum Dan Lingkungan dan kendala-kendala dalam penegakan hukum atas pelanggaran penggunaan trotoar yang tidak sesuai dengan fungsinya ditinjau dari Pasal 4 Huruf G Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Ketertiban Umum Dan Lingkungan.

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini penulis akan memaparkan kesimpulan mengenai pembahasan-pembahasan yang telah diulas pada bagian sebelumnya, sehingga dalam bab ini peneliti akan memberikan penjelasan terhadap permasalahan yang sedang diteliti, selain itu peneliti juga akan memberikan rekomendasi berupa saran dan kritik terhadap hal-hal yang menjadi kendala selama proses penelitian.

